

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia dan Malaysia adalah contoh terpenting dari sebuah masyarakat majemuk, yaitu dalam pengertian lebih dari satu kelompok etnis (rasial). Masyarakat Indonesia dan Malaysia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, ras, agama, dan golongan. Keadaan tersebut memungkinkan sekali terjadi perbedaan dalam masalah sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia, masyarakat etnis Cina berjumlah sekitar  $\pm 3$  % dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 206,3 juta jiwa (menurut data BPS tahun 2000)<sup>1</sup>. Secara kultural, masyarakat etnis Cina yang berada di Indonesia terdiri dari etnis Cina peranakan yang berbahasa Indonesia dan lahir di Indonesia, etnis Cina yang lahir di luar negeri, dan etnis Cina yang lahir di Indonesia, tetapi tetap berbahasa Cina.

Di Malaysia, menurut sensus pada tahun 2000, masyarakat etnis Cina berjumlah sekitar  $\pm 26$  % dari keseluruhan penduduk Malaysia yang berjumlah 21,9 juta jiwa. Sedangkan, etnis Melayu berjumlah sekitar  $\pm 65,1$  % atau kurang lebih berjumlah 14.300.000 jiwa<sup>2</sup>. Secara kultural masyarakat etnis Cina di Malaysia sebenarnya lebih kental ke-Cina-annya. Walaupun demikian terdapat juga kelompok masyarakat etnis Cina yang berbahasa

---

<sup>1</sup> <http://www.bps.go.id/sector/population/tables.shtml>, diakses tanggal 4 april 2007.

<sup>2</sup> *Laporan Am Banci Penduduk* (Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2000).

Melayu yang dikenal sebagai “baba” atau “peranakan”, tetapi jumlah mereka kecil dibandingkan dengan mereka yang berbahasa Cina. Karena polarisasi rasial, jumlah mereka pun menjadi lebih kecil<sup>3</sup>. Dalam masalah keberagaman, masyarakat etnis Cina di Malaysia memeluk berbagai macam agama seperti halnya yang terjadi di masyarakat etnis Cina di Indonesia, mereka ada yang beragama Budha, Kong Hu Chu, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Tao (agama tradisional masyarakat Cina), dan Islam dengan jumlah yang sangat kecil.

Secara garis besar, warga negara Indonesia terdiri dari dua macam kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia pribumi dan masyarakat Indonesia keturunan asing. Masyarakat Indonesia keturunan asing ini, antara lain adalah keturunan bangsa Cina, Arab, India, Eropa. Dari semua keturunan asing ini, keturunan bangsa Cina adalah keturunan yang paling banyak dari keturunan asing lainnya. Dalam hal tersebut, bangsa Indonesia berbangga karena semakin menambah corak keanekaragaman sosial dan budaya bangsa Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut harus dipahami juga oleh bangsa Indonesia bahwa keanekaragaman tersebut akan menimbulkan masalah sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia lainnya, atau dapat terjadi konflik antara keturunan asing dan pribumi.

---

<sup>3</sup> *Straits Chinese Society* (Singapore: Singapore University Press, 1980) hal. 92-93.

Jumlah etnis Cina di negara Indonesia dan negara Malaysia merupakan minoritas secara data statistik, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

**Jumlah Etnis Cina di Indonesia dan Malaysia**

<b>Tahun</b>	<b>Etnis Cina di Indonesia</b>	<b>Etnis Cina di Malaysia</b>
<b>2004</b>	6.3%	23.77%
<b>2005</b>	7.21%	22.56%
<b>2006</b>	10.34%	24.76%

**Sumber: Pikiran Rakyat, 2 April 2007**

Mereka memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan dalam bidang ekonomi di kedua negara tersebut. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan jumlah mereka yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi. Dalam hal ini berbanding terbalik dalam penguasaan bidang ekonomi nasional di kedua negara. Walaupun demikian, ada beberapa masyarakat etnis Cina yang miskin di kedua negara tersebut. Sebagai sebuah kelompok masyarakat etnis, masyarakat etnis Cina, yang pada umumnya berdomisili di daerah perkotaan, secara ekonomis lebih baik keadaannya daripada penduduk pribumi di kedua negara tersebut.

Jika dilihat dari latar belakang sejarah, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1855, pemerintah Hindia Belanda menggolongkan masyarakat menjadi tiga golongan masyarakat untuk menciptakan diskriminasi rasial dalam masyarakat, yaitu:

1. Golongan Orang Kulit Putih (*European*).

Yang dimaksud dengan golongan orang kulit putih adalah orang-orang dari negara-negara di Eropa, baik para pengusaha maupun para pejabat, pegawai pemerintahan, dan militer Hindia Belanda. Mereka diberikan hak dan perlakuan istimewa dalam tingkatan sosial masyarakat, seperti masalah gaji, jaminan sosial, dan hukum, dibandingkan dengan kulit berwarna dan golongan lainnya.

2. Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).

Yang dimaksud dengan golongan timur asing adalah orang-orang Cina, Arab, dan India. Golongan ini adalah golongan tingkat kedua, yaitu golongan yang mendapat perlakuan yang sama dalam soal hukum pidana dengan golongan orang pribumi. Ketentuan ini dimaksudkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda agar para pedagang dan pengusaha Eropa dapat memiliki kepastian hukum dalam mengadakan jual beli dengan kaum pribumi serta pengusaha bukan pribumi yang sebagian besar terdiri dari orang Cina. Dengan demikian, pemisahan golongan seperti ini memberikan kesempatan kepada perantau Cina untuk dapat mengembangkan usahanya serta memberikan keuntungan lebih bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

3. Golongan Pribumi (*Inlaander*).

Golongan pribumi ini menduduki tingkat sosial yang paling rendah. Mereka dibiarkan berada di bawah kekuasaan para pemuka pribumi, seperti para Adipati atau Bupati, Demang, Lurah, dan lain-lain yang

dikontrol oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pengawasannya apabila terjadi konflik dengan golongan kelas dua dan tentunya dengan golongan pertama yaitu, orang-orang Eropa serta pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam masalah hukum, terhadap golongan pribumi ini diterapkan hukum adat apabila terjadi konflik dengan sesama golongan. Tetapi, apabila terjadi konflik dengan golongan Eropa diharuskan menggunakan hukum kolonial, sehingga golongan pribumi tidak mempunyai hak apa pun atas putusan serta perlakuan hukum kolonial tersebut.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, masyarakat etnis Cina di Indonesia, ternyata, berhasil memperoleh kedudukan sosial dan ekonomi yang jauh lebih baik daripada bangsa pribumi. Kesuksesan ini tidak terlepas dari sifat orang Cina yang ulet dan tekun, di tambah lagi dengan pemberian hak istimewa untuk berdagang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perantau-perantau Cina yang berhasil di Indonesia dengan usaha perdagangannya menduduki posisi yang lebih baik. Posisi tersebut menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara bangsa Indonesia (*Pribumi*) dengan golongan keturunan Cina.

Etnis Cina masuk dan berada di Indonesia dan Malaysia merupakan akibat dari penjajahan bangsa Eropa di kedua negara tersebut, Belanda dan Inggris menganjurkan migrasi kepada etnis Cina untuk membangun koloni-koloni di daerah jajahan mereka. Di Indonesia dan Malaysia, etnis Cina yang merupakan kelas menengah dalam tingkat

sosial masyarakat melaksanakan aktivitas dan fungsi ekonomi yang sangat penting bagi para penjajah tersebut..

Setelah kemerdekaan politik dicapai oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945 bagi Indonesia dan pada tahun 1957 oleh Malaysia, penguasa kolonial tersingkir dari dunia politik di kedua negara tersebut dan digantikan oleh para tokoh-tokoh politik pribumi setempat. Dengan demikian, banyak terjadi perubahan, baik dalam segi sosial dan politik maupun peraturan kenegaraan di kedua negara tersebut. Dalam pada itu, etnis Cina yang selama ini menguasai kelompok tengah dalam kelas sosial pada masa penjajahan, mengubah orientasinya dalam masyarakat, yakni menyesuaikan diri dengan kebudayaan Indonesia dan Malaysia, terutama pasca Perang Dunia ke-II. Namun, secara politis etnis Cina di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi pro-Jakarta, pro-Peking (RRC), pro-Taipei (Taiwan), serta mereka yang secara politis tidak mengikatkan diri dengan kelompok mana pun (nonkomonal). Mayoritas etnis Cina, tampaknya, secara politis pasif.

Di Malaysia, secara politis, kelompok etnis Cina terpecah menjadi kelompok yang berorientasi ke Kuala Lumpur, kelompok yang berorientasi ke negeri asing, kelompok yang tidak berorientasi ke mana pun. Dalam hal ini, Wang Gungwu melihat ketiga jenis kelompok masyarakat etnis Cina yang berada di Malaysia dalam kaitannya dengan sifat partisipasi politik mereka, mengatakan bahwa kelompok yang

berorientasi lokal secara kultural tetap menunjukkan identitas Cina merupakan kelompok yang terbesar.<sup>4</sup>

Politik di Malaysia dilaksanakan berdasarkan pembagian etnis. Bahkan, sebelum Malaysia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1957, politik di sana telah dibuat berdasarkan ras. Orang Melayu membentuk asosiasi sendiri dan hanya memperhatikan urusan etnisnya sendiri. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat etnis Cina dan India. Namun, karena pesatnya pembangunan politik di Malaya, berbagai kelompok ras di negara tersebut menjadi sadar politik. Bangsa Melayu yang dipimpin oleh Dato' Onn bin Ja'far, membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (*United Malays National Organization, yang disingkat dengan UMNO*) pada tahun 1946. Etnis Cina yang dipimpin oleh Tan Cheng Lok mendirikan Asosiasi Cina Malaya (*Malayan Chinese Association, yang disingkat dengan MCA*) pada tahun 1949. Etnis India membentuk Kongres India Malaya (*Malayan Indian Congress, yang disingkat dengan MIC*) pada tahun 1946.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pasca kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama dibawah pemerintahan Presiden Ir. Soekarno, masyarakat pribumi mulai tidak menyukai kehadiran golongan etnis Cina dan menaruh curiga atas loyalitas mereka terhadap bangsa Indonesia. Tercatat berturut-turut terjadi kerusuhan yang berbau rasial di beberapa wilayah Indonesia, seperti di

---

<sup>4</sup> Wang Gungwu "*Chinese Politics in Malaysia*"; *The China Quarterly* No. 43 (1970) hal. 1-30.

<sup>5</sup> Setelah terbentuknya negara Malaysia, *MCA* dan *MIC* masing-masing menjadi *Malaysian Chinese Association* dan *Malaysian Indian Congress*.

Jawa Barat (10 Mei 1963). Sikap masyarakat pribumi yang tidak menyukai kehadiran “*Orang-Orang Cina*” ini semakin berkembang karena adanya semacam stereotip etnis yang memandang bahwa golongan etnis Cina tidak mempunyai loyaltitas terhadap bangsa Indonesia, yaitu sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap perjuangan bangsa Indonesia selama zaman Revolusi Kemerdekaan. Dipandang oleh masyarakat pribumi Indonesia sebagai hal yang sangat tidak pantas mereka lakukan.

Dr. Onghokkam (salah seorang tokoh keturunan Cina) dengan tepat berkata “Karena kemerdekaan Indonesia diperoleh lewat perjuangan rakyat Indonesia dan bukan diberikan (seperti Malaysia dan Singapura), maka masuk akal kalau pihak pribumi mengambil serangkaian tindakan untuk menghancurkan struktur sosial yang tidak adil itu setelah negara Republik Indonesia berdaulat”.<sup>6</sup>

Perasaan sentimentasi terhadap masyarakat etnis Cina mempunyai akar yang sangat panjang yaitu dimulai sejak kerusuhan pada tahun 1740. Ketika itu pemerintah VOC Hindia Belanda mengusir dan membunuh orang Cina semata-mata karena sentimen rasial. Kemudian, selama hampir 150 tahun tidak adanya gerakan rasialisme, berturut-turut tercatat kerusuhan pada tahun 1920 di Solo dan di Kudus pada tahun 1916. Hal tersebut, hampir dapat dipastikan, disebabkan adanya penggolongan terhadap masyarakat, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kompas, “Lebih jauh dengan Dr. Onghokkam,” *Kompas*, 13 Desember 1998. hal 2.

<sup>7</sup> Suara Merdeka, “Membentuk Karakter Negeri,”

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0107/09/kha3.htm>, diakses 4 April 2007.



Peristiwa G30S/PKI/1965 tidak hanya menjadi titik balik dari perubahan rejim Orde Lama ke rejim Orde Baru, tetapi hal ini juga menjadi titik balik kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Cina dan kebudayaannya. Pada masa Orde Lama, hubungan yang terjadi antara etnis Cina dengan pribumi Indonesia tidak berjalan baik karena kebijakan pemerintah yang menghambat jalannya proses tersebut. Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan rejim Soeharto, diputuskan bahwa cara yang terbaik bagi masalah etnis Cina di Indonesia adalah melalui Asimilasi. Solusi ini menjadi solusi nasional sebagaimana tecermin dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru yang berkenaan dengan etnis Cina di Indonesia. Kebijakan Asimilasi ini masih tetap diterapkan di Indonesia sampai pada masa Orde REFORMASI ini.

Telah dikemukakan di depan bahwa Malaysia merdeka pada tahun 1957. Dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1969 etnis-etnis di Malaysia hanya memperhatikan etnisnya masing-masing sampai terjadi kerusuhan pada tahun 1969.<sup>8</sup>

Setelah kerusuhan tahun 1969 itu, dianutlah *unity in diversity*, yaitu perbedaan etnis-etnis yang ada di Malaysia sebagai etnis yang harus dihargai karena memperkaya kebudayaan nasional Malaysia. Dominasi politik masyarakat Melayu dalam politik Malaysia lebih jelas kelihatan dengan penerapan *unity in diversity* ini. Selain itu, kekuatan pengambilan keputusan yang dahulu dipegang etnis Cina telah dikurangi, seperti yang

---

<sup>8</sup> Lihat Arend Lijphart, *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration* (New Haven : Yale University Press, 1981).

tampak pada jumlah posisi dalam kabinet yang dipegang oleh etnis Cina di Malaysia. Pengurangan tersebut tidak berarti “menekan” etnis Cina karena masih banyak terdapat etnis Cina yang duduk di dalam parlemen menjadi menteri kabinet, wakil menteri dan sekretaris tetap. Ini sangat berbeda dengan kebijakan politik terhadap etnis Cina di Indonesia di bawah rejim Soeharto yang memberikan peran politik etnis Cina sangat minim. Tahun 1969 di Malaysia sering juga disebut sebagai tahun yang menandai bermulanya proses monopoli kekuasaan yang mantap oleh UMNO dengan konsekuensi terpuruknya peran politik etnis Cina pada posisi yang perifer dalam pemerintahan Malaysia.<sup>9</sup>

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia terhadap keberadaan masyarakat etnis Cina di tengah mayoritas penduduk asli atau pribumi di negara itu masing-masing.
2. Untuk menganalisis tujuan kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Malaysia terhadap masyarakat etnis Cina.
3. Dengan mengetahui hal tersebut di atas, diharapkan dapat membantu dan membuka peluang dalam membangun saling pemahaman antara masyarakat etnis Cina dengan masyarakat asli pribumi di dalam negara itu masing-masing.

---

<sup>9</sup> Heng Pek Koon, *Chinese Politics in Malaysia : A history of The Malaysian Chinese Association* (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1988). hal.261.

4. Dengan mengetahui hal di atas diharapkan juga sebagai tambahan sumbangan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

### **C. Pokok Permasalahan.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan etnis Cina?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Malaysia untuk mengintegrasikan etnis Cina?

### **D. Kerangka Pemikiran**

Berkaitan dengan penganalisaan tentang kebijakan pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Malaysia terhadap masyarakat etnis Cina, akan digunakan *konsep integrasi* sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku politik kedua negara tersebut.

Menurut Myron Weiner, *integrasi* bangsa merupakan proses pengaturan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional, sehingga integrasi secara khusus menunjuk pada masalah membangun rasa kebangsaan dalam suatu

wilayah dengan menghapus kesetiaan-kesetiaan picik pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.<sup>10</sup>

Menurut Howard Wriggins, yang pada dasarnya mengemukakan konsep yang serupa dengan Myron Weiner, mengatakan bahwa *integrasi* berarti suatu penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat kecil menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa<sup>11</sup>. Dari sudut pandang pemerintah, *integrasi* bangsa dapat berarti sebagai kemampuan pemerintah suatu negara yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah negara.<sup>12</sup>

Integrasi meliputi dua aspek, positif dan negatif.<sup>13</sup> Penyatuan masyarakat berarti menghilangkan benih-benih perpecahan yang mungkin menjadi ancaman potensial dalam suatu negara. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat diintegrasikan secara penuh apabila individu-individu yang menjadi unsur masyarakat tetap berdiri secara sendiri-sendiri tanpa ada suatu hubungan dan interaksi serta merasa asing di antara mereka.

Secara garis besar, ada dua strategi yang dapat dipilih untuk mencapai integrasi bangsa, yaitu asimilasi dan kesatuan dalam keanekaragaman (*Unity*

---

<sup>10</sup> Myron Weiner, "*Integrasi politik dan Pembangunan Politik*", dalam Yahya Muhaimin dan Collin Mc Andrews (eds) "*Masalah-Masalah Pembangunan Politik*". Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991. hal 41.

<sup>11</sup> Howard Wriggins, "*Integrasi Bangsa*", dalam Yahya Muhaimin dan Collin Mc Andrews, *op.cit.*, hal 51.

<sup>12</sup> Yahya Muhaimin dan Collin Mc Andrews, "*Masalah-Masalah Pembangunan Politik*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991. hal 51.

<sup>13</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (terj) CV. Rajawali, Jakarta, 1981. hal 340.

*in Diversity*).<sup>14</sup> Strategi asimilasi yaitu menghapus sifat-sifat kultural berbagai kelompok dan menggantikannya dengan satu “*Kebudayaan Nasional*” yang berasal dari kelompok dominan. Asimilasi, secara linguistik adalah sebuah fenomena yang mempertemukan dua fonem yang berbeda dan letaknya berdekatan menjadi satu morfem. Ditinjau dari aspek sosial, asimilasi berarti bercampurnya dua kebudayaan dalam masyarakat setempat (contoh: dalam satu negara atau dalam satu keluarga), sehingga tercipta suatu budaya baru.<sup>15</sup>

Indonesia menerapkan asimilasi untuk mencapai integrasi bangsa, sehingga etnis Cina di Indonesia harus menanggalkan identitas diri mereka, misalnya dengan mengganti nama dengan nama Indonesia, masuk agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia karena agama Konghucu yang merupakan agama yang mayoritas dianut etnis Cina, tidak diakui keberadaannya di Indonesia.

Strategi “*Unity in Diversity*” berarti penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapus identitas kelompok masing-masing. Loyalitas kelompok berdampingan dengan loyalitas terhadap satu negara, kelompok-kelompok itu didorong untuk saling bekerja sama demi tujuan yang sama. *Unity in diversity* berpegang pada prinsip proporsional. Setiap kelompok akan diwakili dalam suatu lembaga sesuai dengan proporsi penduduknya. Adanya *unity in diversity*, di Malaysia, menyebabkan etnis Cina tidak harus menanggalkan

---

<sup>14</sup> Charles F. Andrian, “*Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*”, (terj) PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992. hal 89-90.

<sup>15</sup> Wikipedia, “Asimilasi,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi>, diakses tanggal 1 Mei 2007.

identitas dirinya sebagai etnis Cina. Mereka dapat dengan bebas mengekspresikan budaya mereka untuk memperkaya budaya Malaysia.

#### E. Hipotesa.

Berdasarkan kerangka dasar pemikiran di atas, dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut:

- a) Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan politik *Asimilasi* dalam mengintegrasikan keberadaan masyarakat etnis Cina di negaranya.
- b) Pemerintah Malaysia lebih memilih mengeluarkan pola *Unity in Diversity* dalam mengintegrasikan keberadaan masyarakat etnis Cina di negaranya.
- c) *Asimilasi* secara konseptual merupakan peleburan identitas etnis individu dalam arti etnis yang dimiliki tidak dapat diaktualisasikan di muka umum karena individu tersebut harus mengikuti budaya nasional yang ada. *Asimilasi* di Indonesia diterapkan dengan:

1. perubahan identitas orang Cina menjadi Indonesia, yaitu dalam hal nama;
2. perubahan identitas orang Cina menjadi Indonesia, yaitu dalam hal agama karena pemerintah Indonesia hanya mengakui lima agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha;
3. dilarang melaksanakan kegiatan ibadah agama mereka, yaitu Konghucu;
4. orang Cina tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Cina dalam kegiatan formal dan keseharian.

d) *Unity in diversity* secara konseptual merupakan adanya pengelompokan antaretnis serta adanya pelembagaan perundingan antaretnis, sehingga terdapat proses negosiasi yang melembaga. *Unity in diversity* di Malaysia, diterapkan dengan:

1. orang Cina diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan identitas dirinya sebagai etnis Cina;
2. dapat beribadah sesuai dengan agamanya;
3. diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan budayanya.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini ialah permasalahan umum yang terkait dengan etnis Cina di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia, penelitian dibatasi dalam kurun waktu era Orde Baru di bawah pemerintahan rejim Soeharto (akan diberikan penekanan) sampai dengan era Orde Reformasi (sampai dengan masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri). Sedangkan dalam kasus Malaysia, keutamaan penelitian diberikan pada kurun waktu setelah tahun 1969 (dalam kasus ini kurun waktu yang dianggap sama).

#### **G. Metode Pengumpulan Data.**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi studi terhadap berbagai literatur, jurnal, majalah, dan surat kabar yang memuat informasi tentang keberadaan etnis Cina di Indonesia dan Malaysia.

## **H. Sistematika Penelitian.**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, sistematika penelitian.

### **BAB II: KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ETNIS CINA**

Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep integrasi di Indonesia, kronologis etnis Cina di Indonesia, serta penerapan asimilasi di Indonesia yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta hukum.

### **BAB III: KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP ETNIS CINA**

Dalam bab ini dijelaskan tentang keadaan etnis Cina di Malaysia sebelum tahun 1969, dan kebijakan pemerintah Malaysia setelah tahun 1969.

### **BAB IV: KESIMPULAN**

Bab ini berisi penutup, yang merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.